

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdul Hadi, 2018, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah Dan Dasar Hukumnya*, Sinar Terang, Surabaya.
- Abdul Manan, 2009, *Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Ascarya, 2011, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori, Konsep, dan Implementasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Antonio, M. S., 2013, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Antonio, M. S., 2013, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2015, *Penegakan Hukum dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eri Satriana dan Irma Cahyaningtyas, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Refika Aditama, Bandung.
- Iqbal Hasan, 2022, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet 1, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardani, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2018, *Islamic Banking and Finance in Indonesia*, Gema Insani, Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- M. Nur Rianto Al Arif, 2012 *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis dan Praktis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 2022, *Asas-asas Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut.
- Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 01/BPSK-PDG/I/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP).

C. Jurnal:

Bambang Pujiono, 2024, "Authority of the Consumer Dispute Resolution Board (BPSK) in Resolving Consumer Disputes in the Financial Services Sector." *Journal of Law Science* 4, no. 2.

Dwi Edi Wibowo dan Fradhana Putra Disantara, 2024, "Consumer Protection in The Perspective of Islamic Law: The Principle of Dignified Justice." *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 11 No. 1.

Eko Soponyono, 2013, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Peran dan Fungsi BPSK." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 20, No. 2.

L. Fitriani dan A. Zulkarnain, 2023, "Efektivitas Proses Persidangan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, no. 2,

Risfiana Mayangsari, 2024, "Consumer Protection in Muamalah Transactions." *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 11 No. 1.

D. Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Konsumen,” diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada tanggal 11 Maret 2025 pukul 16.27 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, Putusan No. 407 K/Pdt.Sus-BPSK/2015. Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.

